



BAB 2 Budaya Taat Hukum

Nama	:	
Kelas	:	
No.	:	

Capain Pembelajaran

Menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan harmoni dengan sesama manusia dan lingkungan; menganalisis tata urutan peraturan perundang - undangan di Indonesia; menganalisis makna kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Materi Pembelajaran



Soal listening

Dengarkan soal pada rekaman mp3 berikut kemudian jawab pada kotak yang disediakan! Klik gambar nada untuk mendengarkan soal!



Jawaban

Soal Benar - Salah

Jawablah soal-soal berikut dengan menentukan pernyataan benar atau salah! Klik tanda panah ke bawah dan pilih benar atau salah pada akhir pernyataan!

1. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran hukum hanya terbatas pada sanksi pidana dan tidak mencakup sanksi perdata atau sanksi administratif.
2. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang secara absolut lebih rendah dibandingkan Undang-Undang (UU).
3. Ketaatan terhadap hukum yang didasarkan pada kesadaran diri (internal) dan bukan sekadar ketakutan akan sanksi (eksternal) merupakan indikator tercapainya budaya taat hukum yang ideal.
4. Pengingkaran kewajiban untuk tidak merusak fasilitas umum, seperti mencoret-coret halte, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan hanya pelanggaran etika dan moral.
5. Prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) menjadi landasan utama dalam mengatasi konflik antar jenis peraturan dalam hierarki.

Soal Pilihan Ganda



Jawablah soal berikut dengan memilih jawaban satu jawaban yang benar! Klik pilihan jawaban sampai berwarna hijau!

1. Sebuah kota kecil memiliki peraturan daerah yang mengharuskan semua pemilik usaha kuliner membuang limbah masakan ke instalasi pengolahan limbah terpusat (IPAL). Meskipun sanksinya ringan, 90% pemilik usaha mematuhi aturan tersebut karena mereka menyadari dampak positifnya bagi kebersihan sungai dan kesehatan masyarakat. Pernyataan yang paling tepat untuk menganalisis kasus di atas dalam konteks budaya taat hukum adalah
 - A. Ketaatan yang terjadi didorong oleh faktor eksternal berupa sanksi yang ditegakkan dengan sangat keras oleh pemerintah daerah.
 - B. Budaya taat hukum di kota tersebut sudah mencapai tingkat ideal karena didorong oleh kesadaran hukum internal yang tinggi.
 - C. Keputusan mematuhi peraturan murni didasarkan pada perhitungan untung rugi untuk menghindari biaya denda yang besar.
 - D. Keberhasilan ketaatan hanya bersifat sementara dan akan hilang jika penegakan hukum oleh aparatur dilonggarkan.
 - E. Peraturan yang bersifat lokal (Perda) cenderung lebih mudah dipatuhi daripada peraturan nasional (UU) karena relevansinya lebih tinggi.

2. Asas Supremasi Hukum menjamin bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dan tidak ada satu pun lembaga atau individu yang kebal hukum. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kritik bahwa penegakan hukum tajam ke bawah (menghukum rakyat kecil) tetapi tumpul ke atas (lunak terhadap pejabat/orang kaya). Jika Anda adalah seorang aktivis hukum, maka langkah preventif strategis yang paling efektif Anda usulkan untuk mengatasi fenomena "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" guna menegakkan budaya taat hukum yang adil adalah
 - A. Memperberat semua jenis sanksi hukum agar timbul efek jera bagi setiap pelanggar, tanpa memandang status.
 - B. Melakukan amandemen UUD 1945 untuk mencantumkan sanksi pidana minimum yang wajib bagi pelanggar dari kalangan pejabat publik.
 - C. Mendorong peningkatan independensi lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK, Pengadilan) dan transparansi proses peradilan.
 - D. Menggalakkan program penyuluhan hukum hanya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah karena mereka rentan melanggar.
 - E. Menyerahkan seluruh kasus pelanggaran hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap paling berintegritas



3. Sebuah daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak parkir yang bertentangan secara substansi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (dan perubahannya), mekanisme hukum yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pertentangan ini adalah ...
- A. Peraturan Pemerintah tersebut otomatis batal demi hukum karena Perda lebih bersifat spesifik dan lokal.
 - B. Perda tersebut harus dicabut atau direvisi karena bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi.
 - C. Kedua peraturan dianggap sah karena memiliki kewenangan pembentuk yang berbeda (Pusat vs Daerah).
 - D. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) harus turun tangan untuk melakukan mediasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - E. Peraturan yang dibuat paling terakhir (apakah PP atau Perda) yang berlaku, sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*.
4. Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut!
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Peraturan Pemerintah
 - 3. Undang-Undang
 - 4. Peraturan Presiden
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi
- Jika diurutkan dari yang kedudukannya paling tinggi hingga paling rendah, urutan yang benar adalah:
- A. (1) - (3) - (2) - (4) - (5)
 - B. (1) - (3) - (4) - (2) - (5)
 - C. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
 - D. (3) - (1) - (2) - (4) - (5)
 - E. (1) - (2) - (4) - (3) - (5)
5. Sekelompok warga negara menuntut ganti rugi kepada pemerintah daerah karena wilayah mereka digusur tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa ada proses musyawarah yang melibatkan warga. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, tindakan pemerintah daerah tersebut paling kuat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap
- A. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk membentuk keluarga.
 - B. Hak untuk hidup tenteram, aman, damai, dan hak atas kepastian hukum yang adil.
 - C. Hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk mengeluarkan pendapat.
 - D. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak atas lingkungan hidup yang baik.
 - E. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk berkeluarga.



Soal Drag & Drop

Jawablah soal berikut dengan memasangkan pernyataan dengan kata-kata pada kotak di bawah ini! Jawab soal dengan mengarahkan kotak istilah ke kolom jawaban!

No	Penyataan	Jawaban
1	Upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hak untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan memberikan sanksi tegas.	
2	Konsekuensi yang harus diterima oleh warga negara yang melalaikan kewajiban membayar pajak sesuai jadwal.	
3	Jenis peraturan yang kedudukannya berada tepat di bawah Undang-Undang dan berfungsi melaksanakan UU.	
4	Mekanisme hukum yang digunakan untuk menguji apakah suatu Peraturan Presiden (Perpres) bertentangan dengan UU.	
5	Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara yang mengambil paksa properti pribadi tanpa melalui prosedur ganti rugi yang sah.	

**Pelanggaran
HAM**

Represif

Uji Materi

**Peraturan
Pemerintah**

**Sanksi
Administratif**



Soal Memasangkan

Jawablah soal dengan menarik garis ke istilah yang sesuai dengan pernyataan!

No.	Konsep	Deskripsi
1	Undang-Undang	Norma hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi sumber hukum tertulis lainnya.
2	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi.
3	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
4	Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden
5	Peraturan Presiden (Perpres)	Dasar hukum yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa.